

KINERJA FISKAL DAERAH KEPULAUAN

KONSEP, ANALISIS, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Zhafirah Nuur Ulima
Nurul Anisyah
Muhamad Febrian Arifin
Nizwan Zukri

KINERJA FISKAL DAERAH KEPULAUAN: KONSEP, ANALISIS, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Zhafirah Nuur Ulima
Nurul Anisyah
Muhamad Febrian Afirin
Dr. Nizwan Zukhri, S.E., M.M.

Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KINERJA FISKAL DAERAH KEPULAUAN:
KONSEP, ANALISIS, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Penulis:
Zhafirah Nuur Ulima
Nurul Anisyah
Muhamad Febrian Afirin
Dr. Nizwan Zukhri, S.E., M.M.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vii, 106, uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN: 62-415-5235-458

Cetakan Pertama:
November 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab penerbit

Copyright © 2026 by Tahta Media Group
All Rights Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557
email: tahtaliterasimedia@gmail.com
website: http://store.tahtamedia.co.id/
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul Kinerja Fiskal Daerah Kepulauan Indonesia: Konsep, Analisis, dan Implikasi Kebijakan dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh semakin pentingnya kajian mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, khususnya bagi provinsi-provinsi berciri kepulauan di Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam. Daerah kepulauan menghadapi tantangan fiskal yang berbeda dibandingkan daerah daratan, seperti tingginya biaya pelayanan publik akibat pemisahan geografis antarpulau, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas fiskal daerah, serta tingginya ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, kebijakan desentralisasi fiskal yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade menuntut setiap daerah untuk mampu meningkatkan kemandirian fiskal, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mengelola belanja secara efektif dan efisien. Kondisi tersebut menjadikan evaluasi terhadap kinerja fiskal daerah kepulauan sebagai isu yang strategis, baik dalam perspektif akademik maupun dalam perumusan kebijakan publik.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep-konsep dasar kinerja fiskal daerah, pendekatan analisis yang dapat digunakan, serta gambaran empiris mengenai kondisi fiskal provinsi-provinsi kepulauan di Indonesia. Selain menyajikan landasan teoritis dan regulasi yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah, buku ini juga menguraikan hasil analisis terhadap indikator-indikator utama,

seperti kemandirian fiskal, ketergantungan transfer, dan efisiensi belanja daerah. Melalui pembahasan tersebut, diharapkan pembaca memperoleh gambaran yang utuh mengenai tantangan, potensi, serta arah penguatan kebijakan fiskal bagi daerah kepulauan.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, serta dukungan selama proses penyusunan buku ini, baik dari lingkungan akademik, instansi pemerintah, maupun rekan-rekan yang turut memberikan pemikiran dan motivasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang keuangan publik yang karya-karyanya menjadi referensi berharga dalam penyusunan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Besar harapan penulis agar buku ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, pemerintah, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan wilayah kepulauan di Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan sekaligus menjadi salah satu rujukan dalam mendukung terwujudnya tata kelola fiskal daerah yang lebih mandiri, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Bangka, 23 Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 KERANGKA TEORETIS DESENTRALISASI DAN KINERJA FISKAL **1**
A. Pendahuluan 1
B. Teori Desentralisasi dan Fiscal Federalism 3
C. Konsep Kinerja dan Rasio Keuangan Daerah 7
D. Karakteristik Sosial Ekonomi dan Fiskal Wilayah Kepulauan 10
BAB 2 METODOLOGI EVALUASI FISKAL DAERAH KEPULAUAN **14**
A. Kerangka Analisis dan Formula Rasio 14
B. Metode Pengukuran Disparitas Antarwilayah 20
BAB 3 ANALISIS EMPIRIS KINERJA FISKAL 8 PROVINSI KEPULAUAN DI INDONESIA **24**
A. Evaluasi Kemandirian Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah ... 24
B. Porsi DAU, DAK, dan DBH terhadap Pendapatan Daerah 30
C. Makna Empiris Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Transfer 31
BAB 4 IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGUATAN FISKAL **33**
A. Pendahuluan 33
B. Tantangan Implikasi Desentralisasi di Wilayah Archipelagic 35
C. Strategi Peningkatan PAD dan Efisiensi Belanja 39
D. Redesign Formula Transfer Daerah Berbasis Kepulauan 44
BAB 5 ARAH KEBIJAKAN MASA DEPAN DAN TATA KELOLA FISKAL **49**
A. Transformasi Tata Kelola Keuangan Daerah Kepulauan 49

B. Sinergi Antardaerah dan Inovasi Pembiayaan Kreatif..... 59
C. Roadmap Kebijakan Fiskal Daerah Kepulauan 80
PROFIL PENULIS..... 103

BAB 1
KERANGKA TEORETIS DESENTRALISASI DAN KINERJA FISKAL

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah suatu transformasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemindahan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke entitas pemerintahan yang lebih rendah. Dalam implementasi, desentralisasi memiliki aspek politik dan administratif selain juga dimensi fiskal yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan sumber finansial antar tingkatan pemerintahan. OECD (2019) memandang desentralisasi sebagai konsep yang memiliki banyak dimensi, mencakup aspek politik, administratif, dan fiskal. Keberhasilan desentralisasi sangat tergantung pada cara pembagian kekuasaan tersebut disusun dan dilaksanakan.

Dalam konteks keuangan publik, pembagian peran pemerintahan berkaitan dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Musgrave menyoroti ketiga fungsi ini sebagai elemen penting dalam teori keuangan publik, dengan fungsi alokasi terhubung pada penyediaan barang dan jasa publik, fungsi distribusi berfokus pada pemerataan, dan fungsi stabilisasi ditujukan untuk mencapai tujuan makroekonomi. Kerangka ini menjadi salah satu dasar untuk

BAB 2
METODOLOGI EVALUASI FISKAL DAERAH KEPULAUAN

A. KERANGKA ANALISIS DAN FORMULA RASIO

Kerangka analisis dalam buku ini disusun dengan mempertimbangkan alur logis yang menghubungkan karakteristik fisik wilayah dengan hasil akhir kinerja fiskal. Karakteristik wilayah kepulauan, yang ditandai oleh fragmentasi geografis dan keterbatasan konektivitas, berdampak langsung pada struktur pendapatan daerah. Keterbatasan aktivitas ekonomi berbasis daratan memaksa daerah kepulauan untuk mengandalkan sektor maritim yang sering kali belum dikelola secara optimal, sehingga memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal mereka. Rendahnya tingkat kemandirian fiskal ini mendorong ketergantungan tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi celah fiskal. Di sisi belanja, karakteristik geografis menyebabkan biaya unit layanan publik menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya mempengaruhi efisiensi belanja daerah. Rangkaian kondisi ini secara kumulatif menciptakan disparitas dalam kinerja fiskal antarprovinsi kepulauan yang perlu diukur secara sistematis. Evaluasi kinerja fiskal dalam buku ini akan difokuskan pada tiga indikator utama:

1. Rasio Kemandirian Fiskal

BAB 3
ANALISIS EMPIRIS KINERJA FISKAL 8 PROVINSI KEPULAUAN DI INDONESIA

A. EVALUASI KEMANDIRIAN FISKAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator utama dalam melihat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Dalam kerangka penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama yang digunakan untuk melihat kapasitas pendapatan lokal. PAD sendiri mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lainnya yang sah.

Penggunaan rasio kemandirian dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai ukuran tunggal untuk menentukan baik atau buruknya kinerja fiskal suatu daerah. Rasio tersebut lebih tepat digunakan untuk melihat posisi relatif kemampuan pendapatan daerah dibandingkan sumber pembiayaan yang berasal dari luar daerah. Hal ini penting karena tingginya transfer pemerintah pusat pada daerah kepulauan tidak selalu berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja fiskal yang buruk. Transfer juga merupakan instrumen pemerataan fiskal dan pendanaan pelayanan publik.

BAB 4
IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGUATAN FISKAL

A. PENDAHULUAN

Analisis empiris mengenai delapan provinsi kepulauan menunjukkan bahwa variasi fiskal antar daerah masih tergolong tinggi. Selama tahun 2023 hingga 2025, rata-rata rasio kemandirian fiskal berkisar antara 57,02% hingga 60,83%, sedangkan ketergantungan terhadap transfer rata-ratanya berada di antara 62,55% sampai 64,74%. Secara bersamaan, rata-rata efisiensi belanja menunjukkan kemajuan dengan angka 102,14% pada tahun 2023 yang kemudian menurun menjadi 95,76% pada tahun 2025. Namun, peningkatan rata-rata tersebut belum mampu menghapus ketimpangan kapasitas fiskal yang signifikan di antara provinsi-provinsi yang ada.

Ketidaksamaan ini paling terlihat pada kemandirian fiskal. Koefisien variasi kemandirian fiskal tercatat sebesar 37,97% di tahun 2023, lalu naik menjadi 43,95% pada tahun 2024, dan berkurang menjadi 31,80% pada tahun 2025. Di sisi lain, ketimpangan ketergantungan transfer relatif lebih rendah, dengan angka masing-masing 14,16%, 16,27%, dan 12,25%. Pola yang terlihat ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mendapatkan

BAB 5
ARAH KEBIJAKAN MASA DEPAN DAN TATA KELOLA FISKAL

A. TRANSFORMASI TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH KEPULAUAN

Kemandirian fiskal merupakan prasyarat utama bagi daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, tata kelola keuangan daerah kepulauan saat ini masih dihadapkan pada ketimpangan fiskal yang tajam serta ketergantungan transfer yang sangat tinggi. Untuk memutus rantai kemacetan keuangan lokal (*local finance gridlock*), daerah kepulauan membutuhkan reformasi kelembagaan yang menyeluruh. Transformasi tata kelola keuangan daerah kepulauan bukan hanya berfokus pada aspek administratif, melainkan menyentuh reformasi struktural mulai dari perencanaan anggaran, integrasi sistem teknologi informasi, transparansi dan akuntabilitas publik, hingga perumusan kebijakan yang sensitif terhadap karakteristik geografis bahari.

1. Dari Administrasi Anggaran menuju Tata Kelola Fiskal Berbasis Kinerja

   Reformasi tata kelola fiskal daerah kepulauan harus diawali dengan pergeseran paradigma dari sistem penganggaran

DAFTAR PUSTAKA

Admaja, A., Anggraini, D., Larasati, M., Cahyanti, N. D., Wasil, M., & Dwi, N. (2021). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung periode 2014-2018. Journal of Regional Economics Indonesia, 2(2).

Ahmad, A. C., Amin, C., Mala, S., & Abae, I. (2026). Revisiting fiscal transfer equity: Lessons from Indonesia's General Allocation Fund reform. Amkop Management Accounting Review, 6(1). https://doi.org/10.37531/amar.v6i1.3614

Akadun, A. (2024). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jurnal Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, 2(1), 43–53.

Alvaro, Rendy. (2020). Analisis Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. Jurnal Budget: Analisis Keuangan Negara, 5(1), 130–150.

ANTARA News. (2026). Anggota DPR dorong RUU Daerah Kepulauan mengakomodasi ekonomi biru. Diakses dari: https://www.antaranews.com/berita/5660395/anggota-dpr-dorong-ruu-daerah-kepulauan-mengakomodasi-ekonomi-biru

Arianto, B., Adhayanto, O., Wira, W., Nurhasanah, Wulandari, S. N., Adijaya, Z., & Sucipta, P. R. (2022). Fiscal decentralization: Reformulation of the General Allocation Funds (GAF) policy for archipelagic provinces in Indonesia. Proceedings of the 1st International Conference on Social-Humanities in Maritime and Border Area (SHIMBA 2022). https://doi.org/10.4108/eai.18-9-2022.2326047

Asmarani, Nora Galuh Candra. (2024). Kemenkeu Terbitkan Panduan Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. DDTCNews. Diakses dari: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806789/kemenkeu-terbitkan-panduan-penerbitan-obligasi-daerah-dan-sukuk-daerah

Badan Kerja Sama Daerah Kepulauan (BKS-PK). (2023). Urgensi Percepatan Pengesahan RUU Daerah Kepulauan untuk 8 Provinsi Kepulauan di Indonesia. Jakarta: Badan Kerja Sama Daerah Kepulauan.

Bird, R. M., & Smart, M. (2002). Intergovernmental fiscal transfers: International lessons for developing countries. World Development, 30(6), 899–912. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00016-5

Chalil, T. M., & Roudo, M. (2020). Formula-Based Approach in the Allocation of Specific Allocation Grants for Infrastructure (DAK Fisik): Case of Education Provision. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(3),253–269. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i3.130

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (2020). Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan RI. (2022). Implementasi Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. Kementerian Keuangan RI.

Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), Kementerian Keuangan RI. (n.d.). Blended Finance: Antara Manfaat dan Tantangan dalam Penerapannya. KPBU Kementerian Keuangan. Diakses dari: https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1130-1294/umum/kajian-opini-publik/blended-finance-antara-manfaat- dan-tantangan-dalam-penerapannya

DJPb Kementerian Keuangan RI. (2025). Tinjauan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 s.d. 2024. KPPN Bitung.

Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and governance. World Development, 53, 2–13. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002

Fathaha, R. N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. EBBANK, 8(1), 33–48.

Fathurrahman, F. (2024). Pertumbuhan PAD dan Ketergantungan Transfer Fiskal Daerah di NTB Analisis Panel Kabupaten/Kota 2012–2023. Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik), 4(2), 136–151.

Febriyanto, Herlambang. (2022). Pengaruh DAU, DAK Fisik, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(3), 145– 155.

Feraliani, Valeriani, D., & Yusnita, M. (2021). Analisis disparitas pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Equity: Jurnal Ekonomi, 9(1), 61–71. https://doi.org/10.33019/equity.v9i1

Gesuri.id. (2026). Mercy Christy Barends Sambut Perhatian Presiden Terhadap RUU Daerah Kepulauan. Diakses dari: https://www.gesuri.id/pemerintahan/mercy-christy-barends-sambut- perhatian-presiden-terhadap-ruu-daerah-kepulauan-b2pY5Zbho5

Halim, A. (2012). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.

Ikhwan, Ikhsanul. (2023). Efficiency of Public Expenditure in Sumatera before Covid-19 Pandemic Era. Finance and Sustainability, 1(1), 22–38. http://journals.smartinsight.id/index.php/FS

Indonesiana.id. (2026). RUU Daerah Kepulauan, instrumen Mengatasi Ketimpangan antar Daerah. Diakses dari: https://www.indonesiana.id/read/183436/ruu-daerah-kepulauan- instrumen-mengatasi-ketimpangan-antar-daerah

Kantor Berita ANTARA Ambon. (2026). Pansus RUU Daerah Khusus Kepulauan bahas dana khusus kepulauan. Diakses dari: https://ambon.antaranews.com/berita/336697/pansus-ruu-daerah- khusus-kepulauan-bahas-dana-khusus-kepulauan

Karlina, Siti, & Novianty, Ira. (2023). Publication of Local Government Work Unit Financial Reports on the West Java Provincial Government Website. Finance, Accounting and Business Analysis, 5(2), 127–138.

Kholifaturrahmah, D. A., Murjana, I. M., & Arsana, I. N. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Dompu. Kredibel: Jurnal Ilmiah Manajemen, 1(3), 54–61.

Kondjol, E. H. (2021). Rasio keuangan untuk mengetahui kinerja pemerintahan. Jurnal Pitis AKP.

Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. World Development, 31(9), 1597–1616. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8

Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance: A study in public economy. McGraw-Hill.

Nilawati, Anggraini, & Sugiri, Dani. (2022). Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Perbaikan Kawasan Wisata Museum Karst Indonesia. Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis), 6(2), 633–646. https://doi.org/10.30651/e-bis.v6i2.15243

Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich.

OECD. (2019). Making decentralisation work: A handbook for policy-makers. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en

Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA, 7(3), 2979–2988.

Pambudi, Andi Setyo, & Putri, Desak Made Annisa Cahya. (2022). Evaluasi Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata. Bappenas Working Papers, 5(1), 33–48.

Pambudi, Andi Setyo. (2023). Evaluation of Government Funding Support for National Parks in Indonesia. Indonesian Journal of Applied Environmental Studies, 4(1), 10–21.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. (2022). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kerja Sama Daerah. Kutai Kartanegara: JDIH Kabupaten Kutai Kartanegara.

Poskomalut.com. (2026). Kritisi TKD, Dr. Graal: Transfer ke Daerah Harus Berkeadilan. Diakses dari: https://poskomalut.com/kritisi-tkd-dr-graal-transfer-ke-daerah-harus-berkeadilan/

Prud'homme, R. (1995). The dangers of decentralization. The World Bank Research Observer, 10(2), 201–220. https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). (2020). SDG Indonesia One: Public- Private Solutions Sandbox. AVPN.

Purwaningsih, H., & Khabibah, N. A. (2021). Analisis anggaran belanja untuk menilai kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 4(1), 14–23. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261

Putri, Inkana. (2026). Pansus RUU Daerah Kepulauan Matangkan Skema Dana Khusus Kepulauan. detikNews. Diakses dari: https://news.detik.com/berita/d-8612361/pansus-ruu-daerah-kepulauan-matangkan-skema-dana-khusus-kepulauan

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta.

Saputra, D. (2014). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi, 2(1).

Sari, R. P., Tjahjono, H., & Turino. (2026). Analysis of Financial Performance in Public Sector. JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance, 1(1), 82–90. https://doi.org/10.33005/jasf.v1i01.35

Setiawan, Rana. (2026). Dana Khusus Kepulauan Fokus Utama Pembahasan Pansus, Pastikan Hak Masyarakat Adat. Inilah.com. Diakses dari: https://www.inilah.com/dana-khusus-kepulauan-fokus-utama- pembahasan-pansus-pastikan-hak-masyarakat-adat

Setya, Novian Dika. (2022). Pembiayaan Kreatif dalam UU HKPD (Undang- Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). KPBU Kementerian Keuangan. Diakses dari: https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1200-1615/umum/kajian-opini- publik/pembiayaan-kreatif-dalam-uu-hkpd

Sulistyowati, A. (2025). Integrasi Fiskal Digital Daerah: Strategi Meningkatkan PAD dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 9(2), 135–147. https://doi.org/10.21787/mp.9.2.2025.135-147

Suryadin, et al. (2025). Analisis Prinsip-Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(10), 4680–4695.

Tan, A. (2020). Raising local fiscal autonomy in the local autonomy management: A study in Bogor Regency. Jurnal Bina Praja, 12(1), 53- 63.

Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, 64(5), 416–424. https://doi.org/10.1086/257839

Tolosang, Krest Donald, Walewangko, Een Novritha, & Gamaliel, Hendrik. (2026). Ekonomi Keuangan Daerah. Manado: Yayasan Bina Lentera Insan. ISBN: 978-634-7088-89-5.

Ulima, Zhafirah Nuur, Anisyah, Nurul, Arifin, Muhamad Febrian, & Zukhri, Nizwan. (2026). Fiscal Independence and Transfer Dependency Disparities Among Indonesia's Archipelagic Provinces During the Early Implementation of The HKPD Framework. Jurnal Interprof, 12(2), 71–84. https://doi.org/10.32767/interprof.v12i2.3377

United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Montego Bay. Diakses dari: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

Usemahu, R. H., & Latuamury, S. E. (2024). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Ambon. Journal of Applied Accounting, 3(2), 101-106

Weingast, B. R. (2009). Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives. Journal of Urban Economics, 65 (3), 279-293. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.003

Weingast, B. R. (2014). Second generation fiscal federalism: Political aspects of decentralization and economic development. World Development, 53, 14–25. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.003

Wibowo, Ari. (2025). Benchmarking Keuangan Lokal Kreatif: Inovasi Kebijakan dan Tata Kelola Fiskal Indonesia, Pelajaran dari Negara- Negara OECD. Proceeding National Conference Sisi Indonesia II, 508–517.

Wurangian, C. H., & Sannie, K. S. (2025, Mei 13). Tinjauan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 s.d. 2024. DJPb Kementerian Keuangan RI.

Yunanda, S. (2025). Dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Akuntansi Barelang, 9(2), 165–175.

Yuniasari, A. (2025). Analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Journal of Management and Innovation Entrepreneurship, 2(3), 2029–2036.

PROFIL PENULIS



Zhafirah Nuur Ulima

Penulis merupakan mahasiswa pada Program Studi Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan di Universitas Bangka Belitung. Penulis memiliki minat dalam bidang Manajemen Keuangan, khususnya pada kajian keuangan publik, kinerja keuangan daerah, dan pengelolaan fiskal. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, penelitian, dan penyusunan karya ilmiah. Buku ini merupakan salah satu bentuk kontribusi akademik penulis dalam mengembangkan pemahaman mengenai disparitas kapasitas fiskal antardaerah, khususnya pada wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan.

Email: firapkp1@gmail.com



Nurul Anisyah

Nurul Anisyah merupakan mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung. Memiliki ketertarikan pada bidang keuangan, penelitian, pengolahan data, serta komunikasi visual. Ketertarikannya pada bidang akademik dan riset dikembangkan melalui berbagai kegiatan penelitian, penulisan jurnal, organisasi, kepanitiaan, dan pengembangan kompetensi. Dalam bidang akademik, Nurul Anisyah memiliki pengalaman dalam penelitian dan penulisan jurnal, khususnya pada topik keuangan dan pemasaran. Ia juga memiliki pengalaman mengikuti program Data Analytics and Modeling for Healthcare yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung bersama Cardiff University. Selain kegiatan akademik, Melalui perpaduan antara latar belakang manajemen keuangan, pengalaman penelitian, kemampuan pengolahan data, serta pengalaman organisasi dan kreatif, Nurul Anisyah terus mengembangkan diri untuk berkontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dalam memahami tantangan dan potensi fiskal daerah kepulauan di Indonesia.

Email: nurulanisyah632@gmail.com



Muhamad Febrian Arifin

Penulis merupakan mahasiswa pada Program Studi Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan di Universitas Bangka Belitung. Penulis memiliki minat dalam bidang Manajemen Keuangan, khususnya pada kajian keuangan publik, kinerja keuangan daerah, dan pengelolaan fiskal. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, penelitian, dan penyusunan karya ilmiah. Buku ini merupakan salah satu bentuk kontribusi akademik penulis dalam mengembangkan pemahaman mengenai disparitas kapasitas fiskal antardaerah, khususnya pada wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan.

Email: muhammadfebrian846@gmail.com



Dr. Nizwan Zukhri, S.E., M.M.

Dr. Nizwan Zukhri, SE., MM Lahir di Bengkulu, merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. Gelar S2 Magister Manajemen diraih pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto Jawa Tengah dengan memperoleh beasiswa Asian Development Bank (ADB), dan Pendidikan Doktoral (S3) diselesaikan di Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dengan memperoleh Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN). Penulis juga aktif pada beberapa organisasi, diantaranya Ketua ISEI Cabang Pangkalpinang Koordinator Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2026-2029), Ketua Umum BPMSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2021-2025), dan Wakil Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2011-2020). Beberapa hasil penelitian penulis telah dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi. Selain itu juga aktif menulis pada berbagai media masa. Buku terbaru yang dihasilkan diantaranya Determinan dan Recovery Stunting (2020), Produksi Timah Di Asia Dalam Persfektif Harga Komoditas dan Saham (2022), Membangun Kependudukan Mewujudkan Kesejahteraan (2023), Mengapa Go Public (2024), Manajemen Keuangan (2024), Strategi Digital Global (2025), Metodologi Penelitian Keuangan (2025).

Email: nizwan_ubb@yahoo.com

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan pembangunan yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi geografis, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan. Jarak antarpulau, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, serta perbedaan potensi ekonomi menciptakan kebutuhan fiskal yang beragam di setiap wilayah. Dalam situasi tersebut, desentralisasi fiskal menjadi instrumen penting untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola belanja secara efisien, dan memanfaatkan transfer dari pemerintah pusat secara tepat sasaran.

Buku Kinerja Fiskal Daerah Kepulauan: Konsep, Analisis, dan Implikasi Kebijakan membahas secara komprehensif hubungan antara desentralisasi fiskal, karakteristik wilayah kepulauan, dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pembahasannya diawali dengan landasan konseptual mengenai desentralisasi dan teori fiscal federalism, konsep kinerja keuangan daerah, serta karakteristik sosial ekonomi yang memengaruhi kapasitas fiskal wilayah kepulauan. Kerangka tersebut memberikan pemahaman bahwa perbedaan kinerja fiskal antardaerah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya pendapatan atau pengeluaran, tetapi juga perlu mempertimbangkan struktur ekonomi, kebutuhan pelayanan publik, kapasitas kelembagaan, dan kondisi geografis masing-masing wilayah.

Untuk memberikan gambaran empiris, buku ini mengevaluasi kinerja fiskal delapan provinsi kepulauan di Indonesia selama periode 2023–2025, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Evaluasi dilakukan melalui tiga indikator utama, yakni rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan transfer, dan rasio efisiensi belanja daerah. Selain itu, buku ini menggunakan Koefisien Variasi (Coefficient of Variation/CV) untuk mengidentifikasi tingkat disparitas fiskal antarwilayah. Pendekatan tersebut memungkinkan pembaca memahami perbedaan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, serta kemampuan mengelola sumber daya anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja fiskal delapan provinsi kepulauan masih memperlihatkan kesenjangan yang berarti. Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif kuat dibandingkan sejumlah provinsi lainnya, sedangkan Maluku menghadapi keterbatasan kemandirian fiskal dan ketergantungan transfer yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, perkembangan rata-rata rasio efisiensi belanja menunjukkan perbaikan dari 102,14% pada 2023 menjadi 95,76% pada 2025. Meskipun demikian, perbaikan tersebut belum menghilangkan disparitas kapasitas fiskal antardaerah. Temuan ini menegaskan bahwa ketergantungan terhadap transfer tidak dapat langsung dimaknai sebagai kegagalan pengelolaan keuangan daerah, sebab transfer juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan penopang pelayanan publik, terutama bagi wilayah yang menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan basis ekonomi.

Berangkat dari temuan tersebut, buku ini menguraikan implikasi kebijakan dan strategi penguatan fiskal yang mencakup optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal, rasionalisasi belanja, peningkatan kualitas tata kelola anggaran, serta penyesuaian formula transfer dengan karakteristik wilayah kepulauan. Transformasi pengelolaan keuangan daerah juga diarahkan pada digitalisasi sistem fiskal, penguatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kapasitas aparatur, penganggaran berbasis kinerja, serta pengembangan kerja sama antardaerah dan inovasi pembiayaan kreatif. Seluruh strategi tersebut dirumuskan dalam peta jalan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong perubahan tata kelola fiskal secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, buku ini menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah kepulauan memerlukan pendekatan yang tidak seragam, melainkan kebijakan yang responsif terhadap perbedaan kapasitas pendapatan, kebutuhan belanja, struktur ekonomi, dan kondisi geografis setiap wilayah. Peningkatan kemandirian fiskal harus berjalan seiring dengan pemerataan antardaerah, efisiensi penggunaan anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan mengintegrasikan landasan teoretis, analisis empiris, dan rekomendasi kebijakan, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi keuangan publik, serta pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi pembangunan wilayah kepulauan Indonesia.

CV. Tahta Media Group
Sukoharjo, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.co.id
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896 5427 3996
QRCBN : 62-415-5235-468